KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ibu Kota Negara, pembangunan dimulai, 200.000 pekerja dilibatkan
Tanggal : Sabtu, 04 Juni 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

IBU KOTA NEGARA

Pembangunan Dimulai, 200.000 Pekerja Dilibatkan

BOGOR, KOMPAS – Kendati konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara masih dipersoalkan, pemerintah tetap melanjutkan rencana pemindahan ibu kota negara. Proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara diputuskan untuk dimulai pada paruh kedua tahun 2022. Diperkirakan pelaksanaan pembangunan wilayah ibu kota negara baru di Kalimantan Timur itu akan melibatkan 150.000 hingga 200.000 pekerja.

Rencana pelaksanaan proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru itu disampaikan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/6/2022). "Paruh kedua 2022 akan dilakukan beberapa pengerjaan di lokasi IKN Nusantara. Di antaranya terkait persiapan lahan dan persiapan akses logistik termasuk jalur infrastruktur," kata Bambang seusai rapat terbatas.

Secara keseluruhan, wilayah darat IKN Nusantara seluas 256.142 hektar. Adapun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ditetapkan seluas 6.671 hektar. KIPP inilah yang akan dibangun paling awal.

Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara Sidik Pramono, di tempat terpisah, menjelaskan, pembangunan fisik Istana Negara dan empat kementerian akan dimulai pada semester II tahun 2022. Selain gedung pemerintahan, pembangunan juga difokuskan untuk infrastruktur dasar IKN Nusantara.

Melibatkan banyak pekerja

Bambang menambahkan, pembangunan skala besar akan dilaksanakan pada 2023. Setidaknya 150.000 sampai 200.000 pekerja akan dilibatkan dalam pembangunan KIPP. Dengan melibatkan banyak pekerja, diharapkan pengerjaan proyek pembangunan yang dilakukan dalam waktu sempit bisa sesuai dengan target yang ditetapkan. "Kami ingin target 2024 bisa tercapai," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden pernah menyampaikan target Istana Presiden sudah pindah ke IKN Nusantara pada 2024. Selain itu, empat kementerian, yakni Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan, juga ditargetkan mulai beroperasi di IKN Nusantara pada 2024.

Sementara itu, meski pembangunan akan segera dimulai, UU IKN masih dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini masih ada dua perkara uji formil dan uji materiil UU IKN yang belum diputus oleh MK. Proses pembentukan UU IKN yang berlangsung cepat selama 42 hari ditengarai tidak menerapkan prinsip partisipasi bermakna. (INA/SYA/DEA)